



## PENCEGAHAN KORUPSI SEJAK DINI: PANDANGAN GURU TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Edlin Zhafira Yasmine<sup>1</sup>, Maura Djazmine Arriedo<sup>2</sup>, M. Fauzan Akbar<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi & Bisnis , Fisip , Universitas Bandar Lampung

Email: [zhafirayasmineedlin@gmail.com](mailto:zhafirayasmineedlin@gmail.com) , [mauradjazmine@gmail.com](mailto:mauradjazmine@gmail.com) ,

[fauzanakbar0920@gmail.com](mailto:fauzanakbar0920@gmail.com)

***Abstract** Corruption is one of the serious problems that can damage the social, economic, and governmental systems of a country. Therefore, efforts to prevent corruption need to be implemented from an early age through education, especially in schools. This study aims to identify the obstacles faced by teachers in implementing anti-corruption education and to understand the role of teachers in instilling anti-corruption values in students. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach by collecting data from teachers' perspectives as the main sources. The results show that teachers have an important role in instilling values such as honesty, responsibility, and discipline through classroom learning and daily behavior at school. However, there are several challenges in its implementation, including limited learning materials about anti-corruption education, lack of training for teachers, and external environmental influences that do not always support these values. Therefore, support from schools, government, and society is needed so that anti-corruption education can be implemented more effectively from an early age.*

***Keywords:** anti-corruption education, teacher's role, early corruption prevention, honesty values*

**Abstrak** Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan, salah satunya di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi serta memahami peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari pandangan guru sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan kepada siswa melalui proses pembelajaran maupun contoh perilaku sehari-hari di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan materi pembelajaran tentang anti korupsi, kurangnya pelatihan bagi guru, serta pengaruh lingkungan di luar sekolah yang kurang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat agar pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara lebih efektif sejak dini.

**Kata kunci:** pendidikan anti korupsi, peran guru, pencegahan korupsi sejak dini, nilai kejujuran.

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "corruption"(Inggris) dan "corruptive"(Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.<sup>1</sup> Tindakan

---

<sup>1</sup> Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala desa. IBLAM Law Review, 1(3), 1–21.

korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai sejak dini melalui pendidikan. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan memanfaatkan posisi atau kewenangannya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain, yang secara nyata bertentangan dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.<sup>2</sup> Dunia pendidikan memegang peranan vital dalam proses pembentukan karakter dan penanaman nilai moral bagi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa.

Melalui institusi pendidikan, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai dasar integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Menurut teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona, proses pembentukan karakter yang efektif tidak boleh hanya berhenti pada tingkat kognitif saja, melainkan harus mengintegrasikan tiga aspek utama secara utuh: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Dengan demikian, pendidikan anti korupsi harus mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar siswa tidak hanya memahami konsep kejujuran, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan formal, sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan utama dalam pembentukan karakter siswa.<sup>3</sup>

Di dalam ekosistem pendidikan formal, guru memegang peranan sentral sebagai agen perubahan yang tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab ke dalam jiwa peserta didik. Proses ini dilakukan melalui integrasi materi antikorupsi ke dalam berbagai mata pelajaran guna membangun kesadaran kritis siswa terhadap dampak buruk praktik korupsi bagi masa depan bangsa. Efektivitas penanaman nilai-nilai karakter sangat bergantung pada kemampuan guru untuk memosisikan diri sebagai teladan atau

---

<sup>2</sup> Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

<sup>3</sup> Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 2012).

role model yang nyata di lingkungan sekolah.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan siswa cenderung lebih mudah menyerap nilai moral melalui pengamatan langsung terhadap perilaku disiplin, adil, dan transparan yang ditunjukkan oleh guru mereka dalam interaksi sehari-hari dibandingkan sekadar mendengarkan ceramah di kelas.

Namun, dalam realitas implementasinya, para tenaga pendidik sering kali menghadapi kendala sistemik yang cukup berat, seperti terbatasnya sumber literatur antikorupsi yang relevan, kurangnya pelatihan pedagogis khusus bagi guru, serta beban administratif kurikulum yang sangat padat sehingga fokus pada pendidikan karakter sering kali terpinggirkan.<sup>5</sup> Selain tantangan di dalam sekolah, faktor lingkungan sosial dan budaya permisif di luar sekolah juga menjadi hambatan besar, di mana praktik-praktik kecil yang mencerminkan ketidakjujuran sering dianggap lumrah oleh masyarakat. Hal ini menciptakan standar ganda yang membingungkan bagi siswa, sehingga nilai-nilai integritas yang telah dibangun di sekolah sering kali luntur ketika mereka berhadapan dengan realitas sosial yang tidak mendukung.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi kolaboratif yang kuat antara pemerintah selaku pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan orang tua untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan konsisten. pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga.<sup>7</sup> Upaya bersama ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa pendidikan antikorupsi bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi kokoh untuk melahirkan generasi baru Indonesia yang memiliki integritas tinggi demi keberlanjutan pembangunan nasional.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Analisis Peran Guru dan Kendala dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa.

---

<sup>4</sup> Hidayati, "Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Integritas," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 48-50.

<sup>5</sup> A. Wibowo, "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 19, No. 2 (2013), hlm. 215.

<sup>6</sup> Suyanto, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Nasional," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 5, No. 2 (2015), hlm. 122.

<sup>7</sup> Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami pandangan guru mengenai pendidikan anti korupsi serta peran mereka dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa sejak dini. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas kendala yang dihadapi guru dan upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas di lingkungan sekolah. Subjek penelitian ini adalah guru sebagai narasumber utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengetahui pandangan guru, observasi untuk melihat penerapan nilai anti korupsi di sekolah, dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan humanistik dan pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta sikap positif pada generasi muda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber agar hasil penelitian lebih akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan di sekolah, penanaman nilai-nilai tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melalui pembiasaan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting sebagai aktor utama dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut kepada siswa. Dari wawancara yang penulis peroleh dari Guru, akan penulis tuangkan dalam ringkasan wawancara dibawah ini. Wawancara ini penulis harapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan penulis tentang Analisis Peran Guru dan Kendala dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan seorang Guru yakni Ibu Siti Robiah S.pd yang mengatakan: *“Saya jelaskan santai saja ya, supaya*

*mudah dipahami. Sebenarnya pendidikan anti korupsi itu sudah kami terapkan di sekolah, hanya saja tidak berdiri sebagai mata pelajaran khusus. Biasanya kami sisipkan dalam pelajaran atau saat memberi nasihat ke siswa. Misalnya, ketika ada siswa yang tidak jujur atau mencontek, di situ kami langsung kaitkan dengan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibilang kendala, pasti ada. Waktu belajar itu terbatas, jadi kami harus menyesuaikan dengan materi utama. Kadang ingin menjelaskan lebih dalam tentang bahaya korupsi, tapi waktunya tidak cukup. Selain itu, setiap siswa itu berbeda-beda, ada yang sudah paham pentingnya jujur, tapi ada juga yang masih menganggap hal kecil seperti mencontek itu biasa. Nah, di situ tantangannya. Kami juga sebagai guru harus memberi contoh, karena siswa itu lebih cepat meniru daripada hanya mendengar. Jadi kami membiasakan hal-hal kecil seperti tidak mencontek, jujur, dan bertanggung jawab.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah lebih menekankan pada pendekatan pembentukan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan yang memberikan contoh langsung kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan individu sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mengembangkan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, membentuk karakter, dan meningkatkan mutu pendidikan<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai anti korupsi lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dibandingkan hanya melalui penyampaian teori semata.

Pendapat ini sejalan dengan teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Lickona (2012), yang menyatakan bahwa pembentukan karakter harus melibatkan aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan secara bersamaan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu pembelajaran, di mana guru harus menyesuaikan penyampaian nilai-nilai anti korupsi dengan materi utama yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan

---

<sup>8</sup> Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. UBL Press.

penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan.<sup>9</sup> Selain itu, Penanaman nilai anti korupsi di sekolah harus merujuk pada sembilan nilai integritas yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Guru dapat mengoperasionalkan nilai-nilai ini melalui pembiasaan di sekolah, seperti penerapan kantin kejujuran untuk melatih kejujuran, atau pengawasan kedisiplinan dalam manajemen waktu pengerjaan tugas. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai indikator perilaku, pendidikan anti korupsi tidak lagi bersifat abstrak tetapi menjadi standar perilaku yang konkret bagi siswa an yang bertentangan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik.<sup>10</sup> Namun, keberhasilan penanaman nilai ini tidak akan mencapai hasil maksimal apabila hanya berhenti sebagai materi hafalan di dalam kelas; melainkan harus didukung oleh pendekatan budaya sekolah secara menyeluruh (*whole-school approach*) yang mencakup transparansi tata kelola sekolah dan kebijakan tegas terhadap segala bentuk kecurangan akademik.

Hal ini mencakup komitmen transparansi pihak sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional, kebijakan yang tegas dan konsisten terhadap tindakan plagiarisme atau mencontek, serta penciptaan lingkungan yang lebih menghargai kejujuran proses daripada sekadar pencapaian nilai angka. Jika ekosistem sekolah sudah berintegritas, maka siswa akan lebih mudah mengadopsi nilai-nilai tersebut secara alami<sup>11</sup>. Lebih jauh lagi, diperlukan sinergi yang kokoh dalam konsep Tri Pusat Pendidikan, di mana kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa nilai integritas yang diajarkan di sekolah tetap terjaga konsistensinya saat siswa berada di lingkungan luar sekolah. Konflik nilai sering kali terjadi ketika sekolah mengajarkan integritas, namun anak melihat perilaku permisif terhadap ketidakjujuran di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, koordinasi yang konsisten antara

---

<sup>9</sup> Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: KPK, 2016), hlm.35

<sup>11</sup> K. Komalasari dan H. Saripudin, "Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Nilai Karakter untuk Mengembangkan Karakter Integritas Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 4, No. 2 (2014), hlm. 155.

guru dan orang tua menjadi faktor penentu agar karakter anti korupsi yang terbentuk bersifat permanen.<sup>12</sup>

Tidak semua siswa memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya perilaku jujur, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Faktor lingkungan luar sekolah juga turut memengaruhi perilaku siswa, karena nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu sejalan dengan kondisi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2013) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter individu. Meskipun terdapat berbagai kendala, guru tetap berupaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui berbagai cara, seperti pembiasaan sikap jujur, pemberian contoh perilaku yang baik, serta penguatan nilai moral dalam setiap kesempatan pembelajaran.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya karakter siswa yang berintegritas dan bebas dari perilaku korupsi. Guru diharapkan dapat menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat mencontoh perilaku tersebut. Selain itu, guru juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai kejujuran dan integritas melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat disampaikan melalui penjelasan materi, diskusi, maupun contoh-contoh sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga dapat menanamkan nilai anti korupsi melalui pembiasaan sikap positif di lingkungan sekolah, seperti mengajarkan siswa untuk tidak mencontek saat ujian, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka sebagai pelajar.

Melalui pembiasaan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya sikap jujur dan menjadikannya sebagai bagian dari karakter mereka. Dengan adanya peran guru dalam pendidikan anti korupsi, diharapkan siswa dapat memiliki kesadaran sejak dini mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini juga diharapkan dapat membantu membentuk generasi yang berkarakter dan menjauhi

---

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 22.

perilaku korupsi di masa depan. Selain sebagai teladan dan penyampai materi, guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran nilai. Dalam hal ini, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap perilaku tidak jujur, seperti korupsi dalam bentuk sederhana (misalnya mencontek atau berbohong). Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dengan berbagai peran tersebut, guru menjadi peran utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, peran guru dalam pendidikan anti korupsi tidak dapat digantikan dan perlu didukung oleh berbagai pihak agar hasilnya dapat maksimal. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan anti korupsi, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik seperti studi kasus, dan diskusi kelompok agar siswa lebih mudah memahami nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, sekolah juga dapat memberikan pelatihan atau workshop kepada guru terkait pendidikan anti korupsi.

Dengan adanya pelatihan tersebut, guru akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta strategi yang lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada siswa. Selain upaya yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa strategi lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Salah satu upaya penting adalah pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif. Guru dapat menggunakan video edukatif, studi kasus nyata, maupun cerita inspiratif yang berkaitan dengan dampak korupsi. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga dapat melihat dampak nyata dari perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian oleh Wibowo dalam Jurnal Ilmu Pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan pemahaman nilai moral siswa secara signifikan. Selain itu, penerapan metode pembelajaran partisipatif juga sangat efektif. Siswa dapat diajak berdiskusi, berdebat, atau melakukan simulasi terkait kasus-kasus korupsi sederhana. Menurut Hidayati dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, metode

pembelajaran aktif mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai integritas dan tanggung jawab karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. kenyataannya penanganan korupsi yang sudah sampai pada saat ini masih belum memuaskan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan.<sup>13</sup>

Upaya lainnya adalah dengan memperkuat kolaborasi antara sekolah dan lembaga eksternal. Kegiatan seperti seminar atau sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari lembaga terkait dapat memberikan wawasan tambahan kepada siswa. kenyataannya penanganan korupsi yang sudah sampai pada saat ini masih belum memuaskan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan.<sup>14</sup>Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut telah dipahami dan diterapkan oleh siswa. Menurut penelitian dari Nurhasanah, evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efektivitas pendidikan karakter di sekolah. Tidak kalah penting, penguatan pendidikan berbasis keteladanan harus terus dilakukan. Lickona menegaskan bahwa keteladanan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pendidikan karakter karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung<sup>15</sup>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter individu sejak dini melalui pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat

---

<sup>13</sup> Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi putusan nomor 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192–204.

<sup>14</sup> Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi putusan nomor 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192–204.

<sup>15</sup> Nurhasanah, S. 2019. "Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Moral*, Vol. 4, No. 1, hlm. 60–68.

penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas kepada siswa.

Dalam hal ini, guru memegang peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penyampai materi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter individu sejak dini melalui pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. kenyataannya penanganan korupsi yang sudah sampai pada saat ini masih belum memuaskan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas kepada siswa.

Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral serta kemampuan untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi di masa depan. Keberhasilan pendidikan anti korupsi tidak hanya bergantung pada peran guru dan sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi yang diterapkan secara konsisten, terintegrasi, dan didukung oleh berbagai pihak memiliki potensi besar dalam menciptakan generasi yang berkarakter kuat, berintegritas tinggi, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Upaya ini menjadi langkah penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK.

Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. UBL Press.

Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.

**Jurnal :**

Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi putusan nomor 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192–204.

Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) oleh oknum mantan kepala desa. *IBLAM Law Review*, 1(3), 1–21.

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

Hidayati, N. (2018). Peran guru dalam menanamkan nilai integritas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(1), 45–53.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: KPK.

Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Nurhasanah, S. (2019). Evaluasi pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Moral*, 4(1), 60–68.

Suyanto. (2015). Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 120–130.

Wibowo, A. (2013). Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 210–218.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.